



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adolf, Huala, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Cetakan II, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Batubara, Suleman dan Purba, Orinton, 2013, *Arbitrase Internasional*. Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Cahyadi, Antonius dan Manullang, Fernando, 2011, *Pengantarke Filsafat Hukum*, Cetakan IV, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakanke IV, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martin, Stephen, 1996, *The Economics of Offsets*, Routledge, London.
- Matthews, Ron, 2014, *The UK Offset Model*, First Edition, The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, London.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiadji, Agus, 2016, *Alutsista dan Poros Maritim Indonesia*, Cetakan I, Digdaya, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemardjono, Maria SW, 2010, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soenandar, Taryana, 2006, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Cetakan Ke II. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Untung, Hendrik, 2010, *Hukum Investasi*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Winarno Surakhmad, 1982, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung.
- Yusgiantoro, Poernomo, 2014, *Ekonomi Pertahanan*, Gramedia PustakaUtama, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Peraturan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Internasional di Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal.
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ JasaPemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 129).
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584).
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5596).
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 610).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102).



Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5).

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97).

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

UNCITRAL, *Legal Guide on International Countertrade Transactions, prepared by the United Nations Commission on International Trade Law, New York, 1993.*

UNCISG, *United Nations Convention on Contracts for International Sales of Goods, prepared by the United Nations Commission on International Trade Law, New York, 2010.*

### **C. Artikel**

Muradi, 2008, *Praktik-Praktik Defence Offset di Indonesia*, Jurnal Analisis CSIS, Vol 37, No 3, Februari 2008.

Matthews, Ron, and Ansari, Irfan, 2015, *Economic Orthodoxy v Market Pragmatism: A Case Study of Europe's 'Abandonment' of Defence Offset*. Public Finance and Management, Vol 5, Number 4, pp 378-404.

Petty, Frank, 1999, *Defence Offset: Strategic Military Perspective*, DISAM Journal, Summer 1999, p. 65.

Supancana, I.B, 2012, *Perkembangan Hukum Dagang Internasional*, Badan Pembentukan Hukum Nasional, Jakarta.

Ungaro, Alessandro, 2012, *Trend in Defence Offsets*, 17<sup>th</sup> Annual International Conference on Economics and Security (ICES), Istituto Affari Internazionali, Rome.

### **D. Hasil Penelitian**

Hawin, M, 2015, Materi Pengajaran Modul Hukum Arbitrase, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



- Hawin, M, 2015, Materi Pengajaran Modul Hukum Dagang Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hawin, M, 2015, Materi Pengajaran Modul Hukum Investasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Marsudi, Triatmodjo, 2015, Materi Pengajaran Modul Teori Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sylvia, 2014, *Ofset Pertahanan dalam Kerangka pasal 1320 KUH Perdata: Analisa Implementasi Pasal 3 UU 16/2012*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wilamarta, Handi, 2014, *Praktek Penanaman Modal Tidak Langsung di Pasar Modal Indonesia Dalam Kajian UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

#### **E. Referensi**

*Pocket Finance*, 1999, The Economist –Profile books, London.

#### **F. Sumber Internet**

*Standard Bidding Document*, terbitan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah <https://inaproc.lkpp.go.id/v3/public/sdp/sdp.htm>, diakses pada Senin 10, Juli, 2016, Pukul 09.00 WIB.